

**PENGARUH INKLUSI KEUANGAN DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA
DAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**

Ni Kadek Ayu Junitadewi¹

Made Suyana Utama²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang mendasar dan pusat perhatian di negara manapun. Beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab turunnya tingkat kemiskinan adalah inklusi keuangan, investasi dan penyerapan tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk 1) menganalisis pengaruh inklusi keuangan dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja, 2) menganalisis pengaruh inklusi keuangan, investasi dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, 3) menganalisis pengaruh inklusi keuangan dan investasi terhadap tingkat kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja. Adapun jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 72 pengamatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdapat di Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Teknik analisis menggunakan teknik analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan 1) inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 2) Inklusi keuangan dan investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 3) Inklusi keuangan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja. Investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja.

Kata kunci: *Inklusi Keuangan, investasi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan*

Klasifikasi JEL: *I38, O16, J21, I32*

ABSTRACT

Poverty is one of the fundamental problems in any country. Some of the factors that cause decline in poverty levels are financial inclusion, investment and labor absorption. The purpose of this study was to 1) analyze the effects of financial inclusion and investment on labor absorption, 2) analyze the effects of financial inclusion, investment and labor absorption on poverty levels, 3) analyze the effects of financial inclusion and investment on poverty levels through labor absorption. Technical analysis uses path analysis techniques with 72 observation points. Data collection through BPS and Bank Indonesia. Path analysis was used. The results of the analysis show that financial inclusion have a positive and significant direct influence on labor absorption. Investment have a positive but not significant direct influence on labor absorption. Financial inclusion and investment has a negative and significant direct influence on poverty levels and labor absorption has a negative but not significant direct influence on poverty levels. Financial inclusion and investment do not have an indirect effect on the level of poverty through labor absorption.

keyword: *financial inclusion, investment, labor absorption, poverty level*

JEL Classification : *I38, O16, J21, I32*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh semua negara di dunia dengan berbagai macam latar belakang dan juga penyebabnya. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang tidak hanya dialami oleh negara berkembang, namun juga bagi negara maju yang telah memiliki kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang memadai (Kaur, 2016). Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan (Silva & Sumarto, 2015).

SDG's (*Sustainable Development Goals*) sebagai salah satu program dalam menyongsong perbaikan pembangunan ekonomi yang memiliki lima pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Terdapat 17 tujuan global SDG's beberapa diantaranya yaitu tanpa kemiskinan; tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia; pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak; mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat investasi yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat (Seran, 2017)

Orang miskin bukanlah kelompok tunggal dengan hanya satu masalah kekurangan uang tetapi kemiskinan memiliki banyak dimensi kehidupan yang lebih pendek seperti buta huruf, pengucilan sosial, kurangnya bahan-bahan untuk memperbaiki keadaan keluarga (Mood & Jonsson, 2016). Setiap negara memiliki cara dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin, salah satunya ialah dengan melakukan pembangunan dengan tujuan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakatnya menjadi lebih baik agar jumlah masyarakat miskin dapat berkurang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan public, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya

jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas (Budhi, 2016)

Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar (Kurniawan, 2016). Tingkat kemiskinan identik dengan kualitas hidup yang buruk, hidup dalam kekurangan, kekurangan gizi, buta huruf dan rendahnya tingkat perkembangan manusia. Keberadaan penduduk miskin dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara (Singh & Chudasama, 2020)

Tabel 1. Presentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali (persen)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	6.56	5.74	5.56	5.83	5.84	5.33	5.38	5.20
Tabanan	5.62	4.90	5.21	5.61	5.52	5.00	4.92	4.46
Badung	2.62	2.16	2.46	2.54	2.33	2.06	2.06	1.98
Gianyar	5.40	4.69	4.27	4.57	4.61	4.44	4.46	4.19
Klungkung	6.10	5.37	7.01	7.01	6.91	6.35	6.29	5.86
Bangli	5.16	4.52	5.45	5.86	5.73	5.22	5.23	4.89
Karangasem	6.43	5.63	6.88	7.30	7.44	6.61	6.55	6.28
Buleleng	5.93	5.19	6.31	6.79	6.74	5.79	5.74	5.36
Denpasar	1.79	1.52	2.07	2.21	2.39	2.15	2.27	2.24
Provinsi Bali	4.59	3.95	4.49	4.76	4.74	4.25	4.25	4.01

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2019.

Tabel 1 menunjukkan presentase penduduk miskin selama rentang waktu 8 tahun, dimana kabupaten/kota di Provinsi Bali yang memiliki penduduk miskin tertinggi yaitu kabupaten Karangasem yaitu sebesar 6,28 persen pada tahun 2018, berbanding jauh dengan Kabupaten Badung sebesar 1,98 persen pada tahun 2018. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar merupakan

Kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan paling kecil, dibandingkan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, Buleleng, Tabanan, Jembrana, dan Gianyar.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Bali ialah perlu adanya investasi sebagai sumber pembangunan ekonomi, modernisasi, pertumbuhan pendapatan dan ketenagakerjaan. Investasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, penting untuk menentukan strategi investasi yang akan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (Taufik & Fitriadi, 2015). Arus investasi ke suatu daerah berlangsung terus menerus dan dalam jangka panjang serta dibarengi dengan ekonomi yang berdaya saing tinggi, maka investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok capital yang ada.

Penurunan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali disebabkan adanya investasi, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang (Ahmed *et al.* , 2017). Investasi merupakan modal yang biasanya ditujukan untuk jangka panjang, penanaman modal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha sendiri atau menyertai pada pihak lain. Namun demikian, masih eksis-nya permasalahan kemiskinan di Bali mencerminkan masih diperlukannya formulasi kebijakan yang lebih efektif sehingga mampu mengatasi permasalahan kemiskinan secara menyeluruh (Dariwardani, 2015). Hal ini ditunjukkan dari data bahwa jumlah masyarakat yang masih tergolong kurang mampu tetap ada di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali

Penanaman modal usaha untuk memperoleh keuntungan yang penanamannya dapat berbentuk uang, modal tetap atau pembelian surat berharga. Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Kheir, 2018). Ada beberapa faktor yang dapat menentukan minat para investor untuk berinvestasi di suatu daerah yaitu, potensi sumber daya alam yang menarik, kondisi lingkungan sekitar seperti infrastruktur, pendidikan serta angka korupsi di suatu daerah (Lindblad, 2015). Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula investasi suatu daerah, semakin tingginya investasi, pengangguran akan menurun, apabila

tingkat pengangguran rendah maka akan berbanding lurus terhadap tingkat kemiskinan (Kiaušienė, 2015)

Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dengan demikian hal ini akan menyebabkan kemampuan produksi suatu wilayah menjadi meningkat. Disisi lain, besarnya jumlah tenaga kerja akan menyebabkan terhambatnya pembangunan ekonomi apabila kenaikan jumlah tenaga kerja tidak diimbangi dengan naiknya kesempatan kerja yang tersedia, maka hal tersebut akan memicu semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan perluasan lapangan pekerjaan juga merupakan masalah cukup besar yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran (Peterson, 2017).

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal ini karena salah satu sektor andalan Provinsi Bali yakni sektor pariwisata menjadi sektor yang mendorong sektor lainnya dalam menyongsong pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi dan pariwisata memiliki hubungan kausalitas timbal balik (*reciprocal causal hypothesis*). Artinya, pertumbuhan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Sehingga banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran maka semakin sejahtera kehidupan suatu masyarakat (Kirsh, 2018)

Kemiskinan berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan biasanya penduduk yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang pada umumnya tidak memadai. Dalam keadaan yang dikategorikan miskin, maka seseorang akan menggunakan pendapatannya hanya untuk kebutuhan pokok pangan atau makanan saja dan cenderung mengabaikan kebutuhan yang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan sehingga tidak dapat kehidupan yang layak (Beck *et al.*, 2015).

Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Apabila jumlah lapangan kerja semakin banyak akan diikuti dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap, maka akan berpotensi menurunkan jumlah penduduk miskin yang berakibat pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Agustini, 2017). Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang

pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas dan lapangan kerja yang diciptakan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan yang sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak atau peningkatan dalam kemampuan daya beli.

Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam hal pemerataan pembangunan dapat dinilai melalui dari seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran yang ada, dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru dan semakin bertambah akan berdampak positif pada terserapnya tenaga kerja, sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sistem keuangan yang sedang banyak disoroti oleh para peneliti untuk bisa mengatasi masalah pembangunan ekonomi adalah suatu model yang bernama “Inklusi Keuangan” (Adriani & Wiksuana, 2018). Sektor keuangan memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara di era globalisasi saat ini. Sektor keuangan dengan beragam produk-produk derivatifnya telah menjadi media penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin berkembang pesat. Adanya inklusi keuangan, akses layanan keuangan dari lembaga keuangan formal seperti tabungan, kredit, fasilitas pembayaran, dana pensiun, dan beberapa produk lainnya akan sangat membantu kelompok marginal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan

Peran sektor keuangan yang begitu baik bagi perekonomian pada kenyataannya belum dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Tanpa akses ke layanan keuangan formal akhirnya mereka harus mengandalkan cara pengelolaan uang secara informal, seperti meminjam uang kepada kerabat, pialang uang, rentenir, atau menyimpannya di rumah. Terkadang pilihan tersebut tidak mencukupi, berisiko, mahal, dan tidak dapat diprediksi. Rendahnya masyarakat yang mengakses jasa perbankan dan belum meratanya jumlah kantor

bank yang tersedia juga diikuti dengan rendahnya dana masyarakat yang terhimpun dan kredit yang disalurkan oleh bank (Novianto, 2018)

Indikator perbankan digunakan untuk melihat kondisi inklusi keuangan suatu wilayah dikarenakan sub sektor perbankan merupakan sektor yang memiliki peran paling besar di dalam sektor keuangan formal dibandingkan dengan sub sektor lainnya. Pemrakarsa inklusi keuangan bermaksud membela masyarakat kelompok bawah dengan memberdayakannya dalam aktivitas kehidupan ekonomi bukan dengan bantuan dana atau pangan yang selama ini dilakukan. Institusi keuangan melalui fungsi intermediasinya memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan.

Keuangan yang semakin inklusif dapat memberikan akses terhadap jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, terutama bagi kelompok miskin dan marjinal yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya menjadi lebih sejahtera dengan mengakses layanan keuangan. Hal ini dapat mendorong pendapatan masyarakat miskin semakin meningkat sehingga kesenjangan pendapatan dapat berkurang. Apabila masyarakat semakin bisa menjangkau akses perbankan maka akan memberdayakan individu yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penelitian yang mendukung bahwa pembangunan sektor perbankan dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah pembangunan sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur (Tiwari *et al.*, 2015). Pertama, kredit yang lebih murah membuat investasi semakin menarik, dimana pengusaha kecil memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Jalur kedua, meminjam dengan biaya rendah memberi keuntungan bagi masyarakat miskin untuk investasi pendidikan dan kesehatan. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan jalan keluar dari perangkap kemiskinan.

Akses perbankan yang mudah bagi kelompok masyarakat miskin ini dapat meningkatkan efisiensi alokasi modal, yang dapat mempercepat pertumbuhan agregat, dan mengurangi hambatan dalam akses kredit produktif, yang dapat meningkatkan kesejahteraan

hidup masyarakat miskin sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Semakin terbukanya akses terhadap jasa keuangan, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan akses tersebut serta meningkatkan pendapatannya melalui penyaluran kredit oleh lembaga keuangan terutama apabila digunakan untuk kegiatan produktif

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah Untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali, Untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan, investasi dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali dan Untuk menganalisis inklusi keuangan dan investasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Teori Nurkse tentang lingkaran kemiskinan yang berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu, tetapi juga akan menghadirkan hambatan kepada pembangunan di masa mendatang. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan yang diterima juga rendah. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan dan investasi ini menyebabkan keterbelakangan. Begitu seterusnya.

Ada dua lingkaran perangkap kemiskinan dari segi penawaran (supply) dan permintaan (demand). Segi penawaran menjelaskan bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah akibat tingkat produktivitas rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Rendahnya kemampuan menabung masyarakat menyebabkan tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah, sehingga terjadi kekurangan modal dan dengan demikian tingkat produktivitas juga akan rendah. Begitu seterusnya. Sedangkan dari segi permintaan menjelaskan di negara-negara yang miskin rangsangan untuk menanamkan modal sangat rendah karena keterbatasan luas pasar untuk berbagai jenis barang. Hal ini disebabkan pendapatan masyarakat yang sangat rendah karena tingkat produktivitasnya yang juga rendah, sebagai akibat dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan kekurangan rangsangan untuk menanamkan modal.

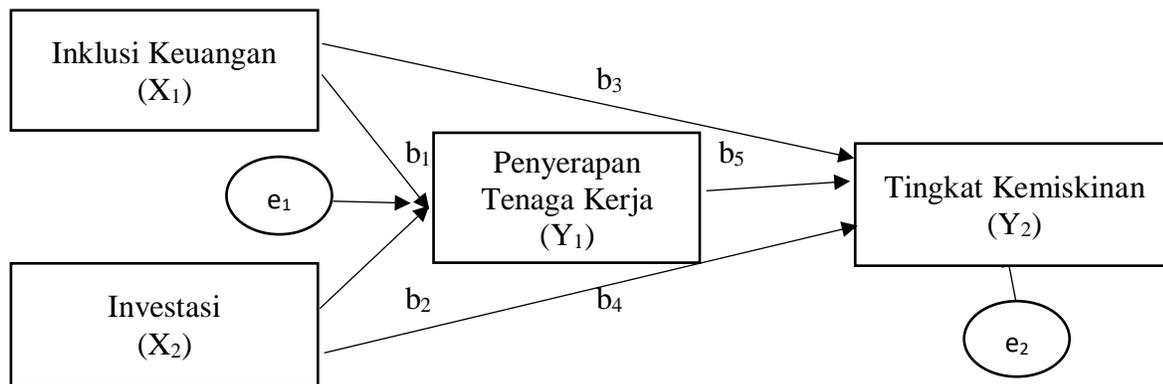
Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang bermula dari ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Untuk dapat mengatasi kemiskinan atau memutus lingkaran setan kemiskinan ini adalah mendorong terjadinya investasi produktif. Dapat dilihat pada gambar 1 yang menunjukkan investasi produktif diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga pada akhirnya dapat memutus lingkaran setan kemiskinan.

Dalam penelitian Magombeyi & Odhiambo (2017) mengatakan bahwa pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan adalah bersifat negatif. Artinya jika investasi meningkat maka tingkat kemiskinan akan berkurang. Secara langsung variabel investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Bali. Hal ini berarti, apabila investasi mengalami peningkatan, maka kemiskinan Provinsi Bali akan menurun (Arshanti & Wiranthi, 2018)

Akar permasalahan kemiskinan kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggi adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja yang tercipta tersebut, sehingga terciptalah pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan oleh Ansori (2018) terdapat pengaruh signifikan dari penyerapan tenaga kerja terhadap jumlah kemiskinan, dengan terus meningkatnya penyerapan tenaga kerja maka akan terus menurun jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan. Apabila masyarakat semakin bisa menjangkau akses perbankan maka akan memberdayakan individu yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya inklusi keuangan masyarakat dapat mengelola keuangannya dengan baik dan sejalan dengan itu masyarakat dapat membuat sebuah usaha yang membutuhkan tenaga kerja dan nantinya akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2014) tujuan utama dari inklusi

keuangan adalah upaya mengurangi kemiskinan. Penelitian mengenai dampak inklusi keuangan terhadap pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh Dixit & Ghosh (2015) dimana hasilnya ialah penyediaan akses layanan keuangan memiliki potensi untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari lingkaran setan kemiskinan melalui budaya menabung, penghematan, serta menciptakan mekanisme pembayaran yang efisien dan rendah biaya.



Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian Pengaruh Inklusi Keuangan dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori maka hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut 1) Inklusi Keuangan dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 2) Inklusi Keuangan, Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 3) Inklusi Keuangan dan Investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kabupaten/kota menggunakan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistika (BPS) dan dinas yang terkait dengan obyek penelitian. Pemilihan lokasi ini dengan mempertimbangkan data yang diperoleh di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali belum merata dan masih adanya ketimpangan penurunan tingkat kemiskinan yang cukup jauh antar kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Obyek penelitian adalah himpunan sebuah elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Obyek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Penelitian ini memfokuskan kajian pada empat variabel utama yaitu inklusi keuangan, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan tingkat kemiskinan. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel eksogen adalah variabel inklusi keuangan (X1) dan investasi (X2). Variabel intervening dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja (Y1). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel endogen adalah variabel tingkat kemiskinan (Y2).

Penyerapan Tenaga Kerja (Y1) dalam penelitian ini adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penyerapan tenaga kerja yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan jumlah angkatan kerja - presentase pengangguran yang dinyatakan dalam satuan persen. Tingkat Kemiskinan (Y2) dalam penelitian ini adalah suatu kondisi ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup. Tingkat kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah presentase jumlah penduduk miskin yang merupakan rasio antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk yang dinyatakan dalam satuan persen.

Inklusi Keuangan (X1) dalam penelitian ini adalah sebuah kondisi dimana semua orang dapat mengakses jasa keuangan berkualitas, tersedia dengan harga terjangkau, dengan cara yang nyaman dan memuaskan. Inklusi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan

jumlah posisi pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR menurut jenis penggunaannya pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dibagi dengan PDRB harga berlaku menurut kabupaten/kota yang dinyatakan dalam satuan persen. Investasi (X_2) dalam penelitian ini adalah pengeluaran atau penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Data investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah investasi perkapita yang diperoleh dari data pembentukan modal tetap bruto dibagi dengan jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam satuan milyar rupiah.

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu inklusi keuangan, investasi, penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu inklusi keuangan, investasi, penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini juga menggunakan data panel di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan pengamatan selama 8 tahun dan titik pengamatan berjumlah 72. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan literatur-literatur lain yang mendukung tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu metode observasi non-partisipan dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mengumpulkan data-data yang sudah tersedia dan telah dipublikasikan oleh pihak lain seperti BPS, Bank Indonesia, dan literatur-literatur lain.

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dengan bantuan program *Eviews10* berupa data panel. Penelitian ini diajukan sebagai penelitian empiris untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tujuan dari analisis data panel menentukan apakah model yang digunakan menganut *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*.

Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji F untuk memilih model mana yang terbaik di antara ketiga model tersebut dilakukan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow

dilakukan untuk menguji antara model *common effect* dan *fixed effect*, sedangkan uji Hausman dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan *fixed effect* dan *random effect*, pengujian tersebut dilakukan dengan *Eviews10*. Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Chow adalah sebagai berikut: Jika hasil uji spesifikasi menunjukkan probabilitas *Chi-square* lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas *Chi-square* kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect*, dan dilanjutkan dengan uji Hausman untuk memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau *random effect*.

Selanjutnya untuk melakukan *Hausman Test*, data juga diregresikan dengan model *random effect*, kemudian dibandingkan antara *fixed effect* dan *random effect* dengan membuat hipotesis. Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Hausman adalah sebagai berikut: Jika nilai *probability Cross-section* random lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *random effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas *Chi-square* kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect*.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen dan hubungan tidak langsung yang melalui variabel intervening.

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

Y_1 = penyerapan tenaga kerja

Y_2 = tingkat kemiskinan

$\beta_{1,2,3,4,5}$ = koefisien regresi

X_1 = inklusi keuangan

X_2 = investasi

e = variabel pengganggu

Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$ ($p > 0,05$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ ($p < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh Inklusi Keuangan dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam kurun waktu 2011-2018. Kemiskinan merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai Negara maupun daerah termasuk di Provinsi Bali. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia masih memiliki masalah sosial seperti kemiskinan, dimana masalah kemiskinan sendiri tidak mudah untuk dituntaskan secara cepat namun harus melalui penanggulangan secara terus menerus sehingga kemiskinan diharapkan akan terus berkurang dari waktu ke waktu. Presentase penduduk miskin di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali berfluktuasi setiap tahunnya dalam kurun waktu 2011-2018.

Presentase penduduk miskin selama rentang waktu 8 tahun, kabupaten/kota di Provinsi Bali yang memiliki penduduk miskin tertinggi yaitu kabupaten Karangasem yaitu sebesar 6,28 persen pada tahun 2018, berbanding jauh dengan Kabupaten Badung sebesar 1,98 persen pada tahun 2018. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar merupakan Kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan paling kecil, dibandingkan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, Buleleng, Tabanan, Jembrana, dan Gianyar.

Penyerapan tenaga kerja adalah peningkatan output akan mengurangi biaya produksi, dimana permintaan akan barang tersebut akan meningkat, hal ini akan mendorong pertambahan jumlah output yang di produksi dan pada akhirnya menambah permintaan akan tenaga kerja. Dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja akan mengurangi jumlah pengangguran dan sejalan dengan itu akan meningkatkan pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2011 penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Bali mencapai 97.05 persen yang terus meningkat sampai 2014 namun sedikit menurun pada tahun 2015 yaitu sebesar 98.01 persen. Pada tahun 2016 kembali meningkat sampai tahun 2018 sebesar 98.63 persen.

Peningkatan penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan yaitu semakin banyaknya lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada, dan sejalan dengan itu akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali. Dengan adanya investasi maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang ada di Provinsi Bali. Investasi perlu dilakukan secara merata pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pemerataan investasi perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin terutama di daerah pedesaan. Investasi yang ada di Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Investasi perkapita kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2011-2018 berfluktuasi cenderung meningkat. Pada tahun 2011 investasi perkapita di Provinsi Bali sebesar 8.41 milyar rupiah dan terus meningkat sampai tahun 2018 yaitu sebesar 11.84 milyar rupiah. Meningkatnya investasi perkapita yang ada di Provinsi Bali dapat disebabkan karena pengelolaan potensi di setiap daerah yang semakin meningkat dan terus meningkatnya investasi perkapita di kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat berdampak baik untuk pengentasan kemiskinan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang mempunyai kualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi.

Inklusi keuangan diperoleh dari jumlah posisi pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR menurut jenis penggunaannya pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dibagi dengan PDRB harga berlaku menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali. Inklusi keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bali berfluktuasi dari tahun 2011-2018. Angka inklusi keuangan tertinggi terjadi pada tahun 2014-2015 sebesar 0.48 persen. Tingkat inklusi keuangan yang paling tinggi yaitu sebesar

69.52 persen pada tahun 2018. Tingkat inklusi keuangan yang rendah di kabupaten lainnya di Provinsi Bali dapat disebabkan oleh masyarakat yang masih lebih memilih LPD atau koperasi yang ada di daerahnya.

1. STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), maksimum, dan minimum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inklusi keuangan memiliki nilai minimum sebesar 18.94 dan nilai maksimum sebesar 88.56 dengan rata-rata sebesar 36.7838 dan standar deviasi sebesar 17.3992. Variabel investasi memiliki nilai minimum sebesar 2.75 dan nilai maksimum sebesar 22.26 dengan rata-rata sebesar 9.00889 dan standar deviasi sebesar 4.57875. Variabel penyerapan tenaga kerja memiliki nilai minimum sebesar 95.44 dan nilai maksimum sebesar 99.66 dengan rata-rata sebesar 98.1101 dan standar deviasi sebesar 0.85502. Variabel tingkat kemiskinan memiliki nilai minimum sebesar 1.52 dan nilai maksimum sebesar 7.44 dengan rata-rata sebesar 4.89014 dan standar deviasi sebesar 1.63409.

2. ANALISIS REGRESI DATA PANEL

Tujuan dari analisis regresi data panel untuk menentukan apakah model yang digunakan menganut *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Agar model yang digunakan baik dan sesuai, diperlukan Uji Chow dan Uji Hausman. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai prob. sebesar $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya berdasarkan hasil tersebut, maka model yang dipilih adalah *fixed effect model*. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai prob. sebesar $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya berdasarkan hasil tersebut maka model yang dipilih adalah *fixed effect model*. Berdasarkan hasil tersebut, model yang dipilih adalah *fixed effect model*.

3. HASIL PENGUJIAN KOEFISIEN ANALISIS JALUR

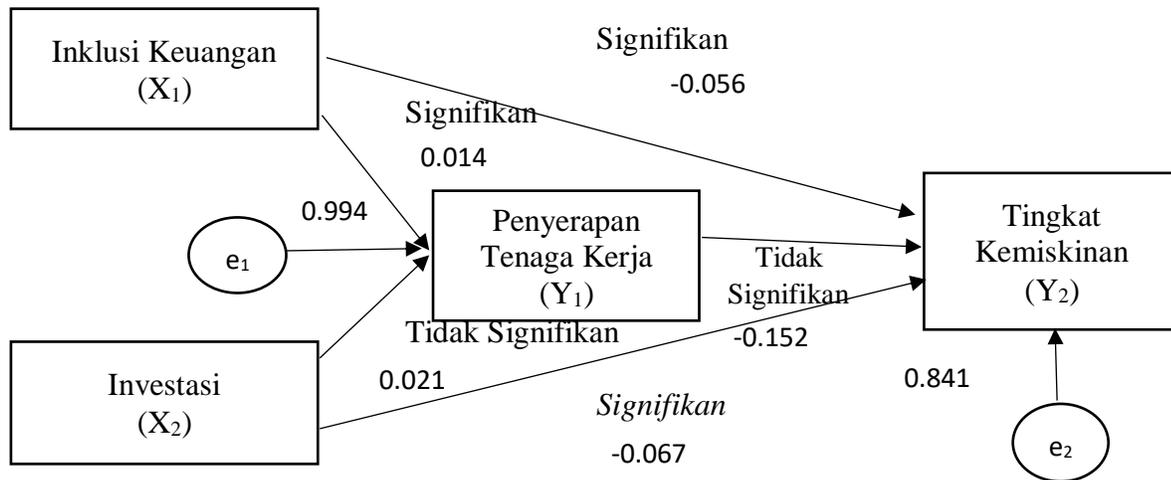
Pemeriksaan Validitas Model, berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total R^2_m : 0.619 maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 61,9 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 61,9 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 38,1 persen

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model. Uji Pengaruh Langsung (Path Coefficient), berdasarkan hasil olahan data, pengaruh langsung suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengaruh Langsung Antar Variabel Penelitian

Hubungan Antar Variabel	Coefficient	Std. Error	t-statistic	Prob.	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	0.014	0.006	2.214	0.030	Positif dan Signifikan
$X_1 \rightarrow Y_2$	-0.056	0.009	-6.110	0.000	Negatif dan Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	0.021	0.025	0.872	0.386	Positif namun Tidak Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	-0.067	0.034	-1.967	0.053	Negatif dan Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	-0.152	0.165	-0.923	0.359	Negatif namun Tidak Signifikan

Berdasarkan Tabel 2, hubungan antar variabel dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 2.



Gambar 2 Koefisien Jalur Hubungan Antarvariabel Penelitian

Berdasarkan Tabel 2, dapat dijelaskan bahwa variabel inklusi keuangan (X1) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja (Y1) dengan nilai probabilitas sebesar 0.030 atau kurang dari 5 persen. Variabel inklusi keuangan (X1) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Y2) dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Variabel investasi (X2) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja (Y1) dengan nilai probabilitas sebesar 0.386. Variabel investasi (X2) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Y2) dengan nilai probabilitas sebesar 0.053. Variabel penyerapan tenaga kerja (Y1) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Y2) dengan nilai probabilitas sebesar 0.359. Hubungan

antar variabel penelitian secara lengkap juga disajikan pada diagram jalur Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 apabila dicermati bahwa tidak ada koefisien jalur yang memiliki nilai lebih dari satu, namun variabel inklusi keuangan, investasi dan penyerapan terdapat koefisien kurang dari minus satu.

Uji Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect), pada penelitian ini, uji Sobel digunakan untuk menguji analisis path. Hasil uji Sobel ditunjukkan pada Tabel3.

Tabel 3. Pengaruh Tidak Langsung (*Inderect Effect*) Variabel Penelitian

Hubungan Antar Variabel	Variabel Mediasi	Axb	Sab	Z	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_2$	Y_1	-0.002	0.002	-0.100	Tidak Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	Y_1	-0.003	0.002	-2.046	Tidak Signifikan

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung variabel inklusi keuangan (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) melalui penyerapan tenaga kerja (Y_1) memiliki nilai axb sebesar -0.002 lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung inklusi keuangan (X_1) melalui penyerapan tenaga kerja (Y_1) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y_2). Pengaruh variabel investasi (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) melalui penyerapan tenaga kerja (Y_1) memiliki nilai axb -0.003 lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung variabel investasi (Y_2) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) melalui penyerapan tenaga kerja (Y_1).

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Langsung Inklusi Keuangan dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/kota di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di

Provinsi Bali. Artinya dengan semakin tinggi inklusi keuangan maka penyerapan tenaga kerja akan semakin meningkat, karena apabila masyarakat semakin bisa menjangkau akses perbankan maka akan memberdayakan individu yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya inklusi keuangan masyarakat dapat mengelola keuangannya dengan baik dan sejalan dengan itu masyarakat dapat membuat sebuah usaha yang membutuhkan tenaga kerja dan nantinya akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Keberhasilan keseluruhan program atau kebijakan untuk meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada setidaknya dua faktor lain yang harus dianggap sebagai prasyarat keberhasilan. Ini adalah pertama, penghasilan yang lebih baik untuk peluang kerja bagi mereka yang berada di masyarakat yang ditargetkan untuk pendidikan keuangan agar mereka dapat menghemat uang mereka atau untuk membuka rekening bank, dan kedua, akses mudah ke alat dan lembaga keuangan, bersama dengan infrastruktur pendukungnya, untuk semua orang Indonesia, bahkan mereka berada di daerah terpencil atau kurang berkembang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal itu berarti antara variabel investasi dengan variabel penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif. Artinya jika investasi naik maka, penyerapan tenaga kerja juga akan naik, begitu pula sebaliknya (Romdhoni, 2017). Lebih lanjut, walaupun sejumlah keuntungan dari investasi ini kembali kepada investor, namun investasi ini menaikkan persediaan modal, yang kemudian menaikkan produktivitas dan gaji (Kadir & Suriadi, 2016). Investasi yang mempunyai *multiplier effect* berdampak pada peningkatan kesejahteraan, yang diukur melalui kenaikan pendapatan. Artinya apabila pendapatan meningkat, jumlah barang dan jasa yang akan dikonsumsi akan meningkat pula.

Apabila permintaan barang dan jasa meningkat, maka akan meningkatkan peluang lapangan kerja. Hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran. Berkurangnya pengangguran ini disebabkan oleh terserapnya angkatan kerja dalam proyek-proyek investasi. Investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya, peningkatan investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

B. Pengaruh Langsung Inklusi Keuangan, Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pernyataan yang mendukung terkait pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan yang mengaitkan inklusi keuangan dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan negara-negara berkembang di Asia menyatakan bahwa inklusi keuangan adalah salah satu strategi untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan dan sering dianggap sebagai alat yang efektif yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang lebih rendah (Anwar *et al.*, 2016). Saat banyak pihak sepakat tentang kebijakan dasar yang penting bagi inklusifitas dan penurunan kemiskinan, beberapa literatur baru telah mengidentifikasi hubungan antara inklusi keuangan dan pembangunan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adanya pengaruh yang negatif antara investasi terhadap tingkat kemiskinan disebabkan karena adanya peningkatan investasi dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Gorontalo memberikan dampak yang positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, investasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berupa sumber nafkah atau pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya. Investasi juga menghasilkan nilai tambah, yang merupakan balas jasa produksi, sekaligus sebagai sumber pendapatan atau kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penyerapan Tenaga kerja merupakan faktor yang krusial karena berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, peningkatan penyerapan tenaga kerja menjadi prioritas utama untuk mengurangi jumlah penduduk miskin (Ansori, 2018). Lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan dalam pendidikan berkualitas untuk anak-anak serta biaya yang lebih rendah untuk melakukan investasi. Namun dibutuhkan kesabaran. Ini

adalah transisi bertahap, dan akan membutuhkan lebih dari satu dekade bagi investasi keterampilan untuk diterjemahkan menjadi angkatan kerja yang lebih produktif dan peningkatan pendapatan nasional dan keluarga.

Penyerapan Tenaga kerja merupakan faktor yang krusial karena berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan, peningkatan penyerapan tenaga kerja menjadi prioritas utama untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Penyerapan tenaga kerja karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya jumlah kemiskinan jika pengangguran semakin banyak maka angka kemiskinan akan semakin meningkat. Membuka banyak lapangan pekerjaan sangat di perlukan dan dibutuhkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu menekan angka kemiskinan yang ada.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh penyerapan tenaga kerja bukan merupakan variabel intervening inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan variabel intervening inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya inklusi keuangan masih belum efektif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat yang akan berdampak pada penurunan kemiskinan.

Inklusi keuangan dapat menjelaskan bahwa semakin tinggi indeks inklusi keuangan suatu wilayah berhubungan terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Indeks inklusi keuangan dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui perkembangan kegiatan keuangan disuatu wilayah dan menunjukkan sejauh mana strategi nasional keuangan inklusif yaitu pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

Keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan yang semakin inklusif dapat memberikan akses terhadap jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, terutama bagi kelompok miskin dan marjinal yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya menjadi lebih sejahtera dengan mengakses layanan keuangan.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh penyerapan tenaga kerja bukan merupakan variabel intervening investasi terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan variabel intervening investasi terhadap tingkat kemiskinan. Artinya lemahnya hubungan antara investasi terhadap tingkat kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja menunjukkan adanya dampak bahwa tingginya investasi yang lebih di arahkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dibandingkan untuk menurunkan kemiskinan.

Studi yang dilakukan oleh Radulescu *et al.* (2019) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah terutama didorong oleh investasi yang berpengaruh secara signifikan. Hal ini berarti bahwa investasi yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran bisa direduksi, pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakatpun meningkat. Investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan (*knowledge*) dari negara maju ke negara berkembang.

Adanya perbedaan substansial dalam kemampuan negara untuk menerjemahkan pertumbuhan ekonomi ke pengurangan kemiskinan, berdasarkan masing-masing profil ketidaksetaraan dan pendapatan. Memahami profil khusus negara semacam itu sangat penting dalam menyusun kebijakan untuk mencapai pengurangan kemiskinan secara paling efektif secara global. investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja. Faktor yang menyebabkan investasi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu dengan adanya investasi maka dibutuhkan tenaga kerja untuk merealisasikan investasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa variabel inklusi keuangan, investasi dan penyerapan tenaga kerja akan menurunkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Inklusi keuangan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses layanan lembaga keuangan formal seperti tabungan, kredit, fasilitas pembayaran, dana

pension, dan produk lainnya yang akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran dalam menggunakan layanan keuangan formal yang ada, agar dapat mengurangi hambatan dalam akses kredit produktif, yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan akses terhadap jasa keuangan yang semakin terbuka dan diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya melalui penyaluran kredit oleh lembaga keuangan terutama apabila digunakan untuk kegiatan produktif.

Investasi juga memiliki peran penting dalam penurunan tingkat kemiskinan karena investasi merupakan modal yang biasanya ditujukan untuk jangka panjang, penanaman modal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain. Investasi dapat ditingkatkan agar dapat membantu membuka lapangan pekerjaan sehingga nantinya dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang akan sejalan dengan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Penyerapan tenaga kerja dapat mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan dapat dinilai dari kemampuan pemerintah dalam menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran yang ada. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap nantinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya akan sejalan dengan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

SIMPULAN

Inklusi Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi memiliki pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi yang tidak signifikan dapat karena investasi lebih banyak disalurkan ke sektor proyek padat modal

(jasa) dibandingkan ke sektor proyek padat karya, dimana dalam sektor proyek padat modal hanya sedikit menyerap tenaga kerja.

Inklusi Keuangan dan Investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dapat disebabkan karena disaat penyerapan tenaga kerja tinggi masih banyak masyarakat yang bekerja di bawah waktu kerja standar yaitu 35 jam karena kurangnya pendidikan masyarakat yang menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi rendah dan masyarakat tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sehingga masih berada di bawah garis kemiskinan. Inklusi Keuangan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Dengan adanya inklusi keuangan, akses layanan keuangan dari lembaga keuangan formal seperti tabungan, kredit, fasilitas pembayaran, dana pensiun, dan beberapa produk lainnya akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan. Inklusi keuangan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap layanan keuangan. Masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya menjadi lebih sejahtera dengan mengakses layanan keuangan. Maka diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya peran lembaga keuangan yang ada di daerahnya agar dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Investasi hendaknya diarahkan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali yang memiliki investasi fisik yang rendah sehingga alokasi investasi tidak terpusat pada daerah tertentu dan alokasi investasi juga diharapkan merata di semua sektor. Peningkatan investasi yang diperoleh suatu daerah harus diimbangi dengan terserapnya tenaga kerja yang ada di setiap daerah, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi pemerintah dalam hal pendidikan perlu ditingkatkan,

agar dalam jangka panjang tenaga kerja terdidik akan dengan mudah terserap ke dalam lapangan kerja (sektor padat modal), dengan begitu akan meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan selanjutnya mengurangi angka kemiskinan.

Pemerintah harus memperhatikan tentang penyerapan tenaga kerja karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya jumlah kemiskinan jika pengangguran semakin banyak maka jumlah kemiskinan akan semakin meningkat. Membuka banyak lapangan pekerjaan sangat di perlukan dan dibutuhkan karena dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu menurunkan jumlah kemiskinan. Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam hal pemerataan pembangunan dapat dinilai melalui dari seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran yang ada, dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru dan semakin bertambah akan berdampak positif pada terserapnya tenaga kerja, sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Adriani, D., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Inklusi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Pertumbuhan Umkm Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(12), 6420 – 6444.
- Agustini, Y. (2017). Pengaruh Investasi PMDN, PMA, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 97–119.

- Ahmed, K., Qasim, M., & Muhammad, C. (2017). Impact of Exchange Rate on Exports in Case of Pakistan. *Bulletin of Business and Economics*, 6(2), 98-102.
- Ansori, J. P. (2018). Analisis Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Dan Upah Minimum Pekerja Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 3(1), 555–572.
- Anwar, A., Uppun, P., Tri, I., & Reviani, A. (2016). The Role of Financial Inclusion to Poverty Reduction in Indonesia. *Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 18(6), 37–39. <https://doi.org/10.9790/487X-1806033739>
- Arshanti, K. N., & Wiranthi, I. G. A. P. (2018). Pengaruh Investasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Mediasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(5), 513–524.
- Beck, T., Demircuc-Kunt, A., & Levine, R. (2015). SMEs, Growth, and Poverty. *Journal of Economic Growth*, 1(1), 199–229.
- Budhi, M. K. S. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 1(6), 1–6.
- Dariwardani, N. M. I. (2015). Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008-2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(1), 7 – 15.
- Dixit, R., & Ghosh, M. (2015). Financial Inclusion for Inclusive Growth of India a Study of Indian States. *International Journal of Business Management & Research*, 3(1), 147–156.
- Kadir, M. R., & Suriadi, L. O. (2016). Pengaruh Investasi Dan Konsumsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Di Kota Kendari. *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 12–22.
- Kaur, M. (2016). Knowledge in the Economic Growth of Developing Economies. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 8(2), 2015–2212.
- Kheir, V. B. (2018). The nexus between financial development and poverty reduction in Egypt. *Review of Economics and Political Science*, 3(2), 40–55. <https://doi.org/10.1108/reps-07-2018-003>
- Kiaušienė, I. (2015). Comparative assessment of women unemployment and poverty in European Union. *Intellectual Economics*, 9(2), 91–101.
- Kirsh, Y. (2018). Unemployment and Job Creation in a Prosperous Economy. *SSRN Electronic Journal*, 1(1), 1–32. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2827204>

- Kurniawan, J. (2016). Dilema Pendidikan dan Pendapatan di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 59–67.
- Lindblad, J. T. (2015). Foreign Direct Investment In Indonesia : Fifty Years Of Discourse. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 51(2), 217–273.
- MAGOMBEYI, M. T., & ODHIAMBO, N. M. (2017). Foreign Direct Investment And Poverty Reduction. *Comparative Economic Research*, 20(2), 287–295. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758>
- Mood, C., & Jonsson, J. O. (2016). The Social Consequences of Poverty: An Empirical Test on Longitudinal Data. *Soc Indic Res*, 127(1), Soc Indic Res.
- Novianto, P. S. (2018). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Terpilih Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2016. *Jurnal Diponegoro*, 1(1), 1–20.
- Peterson, E. W. F. (2017). The role of population in economic growth. *SAGE Open*, 7(4), 1–12. <https://doi.org/10.1177/2158244017736094>
- Radulescu, M., Serbanescu, L., & Sinisi, C. I. (2019). Consumption vs. Investments for stimulating economic growth and employment in the CEE Countries—a panel analysis. *Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*, 32(1), 2329–2353. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1642789>
- Romdhoni, A. H. (2017). Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(2), 1–20.
- Sanjaya, M. D. (2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Perbankan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. Universitas Diponegoro.
- Seran, S. (2017). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1), 1–10.
- Silva, I. De, & Sumarto, S. (2015). Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 227–242.
- Singh, P. K., & Chudasama, H. (2020). Evaluating poverty alleviation strategies in a developing country. *PLoS ONE*, 15(1), 1–23. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227176>
- Taufik, M., & Fitriadi, E. R. (2015). Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi*

Kuantitatif Terapan, 7(2), 1–20.

Tiwari, A., Shahbaz, M., & Islam, F. (2015). Does financial development increase rural-urban income inequality? Cointegration analysis in the case of Indian economy. *Int J Soc*, 40(2), 151–168.